

**IDEOLOGI KHILAFAH ISLAM PASCA PEMBUBARAN HTI OLEH
PEMERINTAH (Analisis Framing Terhadap Majalah Gema Pembebasan)
“SKRIPSI”**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Program Studi Aqidah Filsafat Islam



Oleh:

Rahmat Ali Tirmidzi

NIM. E91218093

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Ali Tirmidzi

NIM : E91218093

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Gresik, 5 Januari 2023



Rahmat

Rahmat Ali Tirmidzi

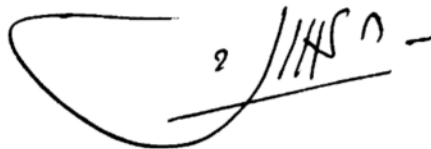
NIM. E91218093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Ideologi Khilafah Islam Pasca Pembubaran HTI Oleh
Pemerintah: Analisis Framing Terhadap Majalah Gema Pembebasan” yang ditulis
oleh Rahmat Ali Tirmidzi ini telah disetujui pada tanggal

Surabaya, 5 Januari 2023

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of vertical strokes followed by a small 'n' and a dash on the right.

Dr. H. Kasno, M.Ag

195912011986031006

PENGESAHAN SKRIPSI

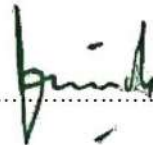
Skripsi berjudul “Ideologi Khilafah Islam Pasca Pembubaran HTI Oleh Pemerintah: Analisis Framing Terhadap Majalah Gema Pembebasan” Oleh Rahmat Ali Tirmidzi ini telah disetujui di depan Tim Penguji pada tanggal 9 Januari 2023.

Tim Penguji

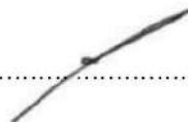
1. Dr. Kasno, M.Ag.



2. Dr. Muktafi, M. Ag



3. Fikri Mahzumi, S. Hum., M. Fil. I



4. Wildah Nurul Islami, M. Th. I.



Surabaya, 15 Februari 2023



Prof. Dr. Abdul Kadir Rivadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmat Ali Tirmidzi
NIM : E91218093
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : rahmatalitirmidzi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Idcologi Khilafah Islam Pasca Pembubaran HTI Oleh Pemerintah : Analisis Framing Terhadap

Majalah Gema Pembebasan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2023

Penulis



(Rahmat Ali Tirmidzi)

ABSTRAK

Tulisan ini meneliti tentang gerakan eks-HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah. terdapat banyak celah yang dimanfaatkan oleh para eks-HTI untuk terus menyebarkan paham yang dianutinya sebagai kebenaran, yakni berdirinya Negara Islam atau Khilafah Islamiyah. Salah satu yang ditempuh melalui tulisan di media Online. Majalah gema pembebasan merupakan salah satu yang giat membuat tulisan propaganda mengenai berdirinya Khilafah Islamiyah sebagai solusi kenegaraan.

Terdapat dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana aktivitas eks-HTI pasca pembubaran HTI? Kedua, Bagaimana framing media ideologi Khilafah Islam eks-HTI? Penelitian ini mengkaji majalah online gema pembebasan serta beberapa penelitian terdahulu betema sama. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori analisis framing perspektif Robert Entmann.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan kecenderungan bagaimana Hizbut Tahrir dalam menyampaikan sebuah pesannya melalui majalah Online Gema Pembebasan. Kecenderungan atau aspek yang ditonjolkan Hizbut Tahrir yang dimaksud adalah pada empat skema framing. Dalam konteks *define problems* (pendefinisian masalah), Hizbut Tahrir dalam majalah online tersebut cenderung menyoroti masalah kegagalan sistem pemerintahan demokrasi. Pada konteks *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), Hizbut Tahrir cenderung mengklaim bahwa penyebab masalah adalah negara. Aspek *make moral judgement* (membuat pilihan moral) dalam hal ini Hizbut Tahrir dominan mengajukan kritik. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan Hizbut Tahrir sesungguhnya mengerucut pada konteks penegakan syariat atau sistem khilafah sebagai substitusi sistem demokrasi.

Kata Kunci : Eks-HTI, Analisis Framing, majalah online

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Mapping Kajian Terdahulu	10
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Landasan Teori	20
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II.....	23
KHILAFAH ISLAMIYYAH DAN FRAMING	23
A. Definisi dan Sejarah Khilafah Islam	23
B. Peran Ideologi Khilafah Islam Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia	29
C. Analisis Framing.....	33
D. Model Analisis Framing Robert N. Entman.....	37
BAB III	42
HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN PROPAGANDA	42
A. Profil Organisasi Hizbut Tahrir.....	42
B. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	48
BAB IV.....	53
ANALISIS FRAMING MAJALAH GEMA PEMBEBASAN PERSPEKTIF ROBERT ENTMAN.....	53
A. Frame Headline Majalah Online Gema Pembebasan.....	53
B. Skema News Framing pada Majalah Online Gema Pembebasan	55
BAB V.....	73
PENUTUP	73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN DOKUMEN	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

HTI merupakan bagian salah satu organisasi yang keberadaannya cukup lama di Indonesia. Meskipun organisasi tersebut sebagian dari jaringan organisasi transnasional yang pendirinya bernama Taqiyuddin an Nabhani tahun 1952 di Jerusalem organisasi ini didirikan. Karena ideologi yang diusung oleh HTI adalah ingin berdirinya khilafah Islamiyah di setiap negara, sehingga organisasi Hizbut Tahrir sudah menjadi Gerakan politik yang berkembang lintas negara, hingga sampai ke Indonesia. Awal mula perkembangan HTI masuk ke Indonesia melalui Mustafa dan Abdurrahman al-Baghdadi. Karena mereka pernah terlibat dalam aktivitas HTI di Yordania dan menggangu Taqiyuddin an-Nabhani, sehingga ia mulai menyebarkan pemikiran-pemikiran HTI di Indonesia. Aktivitas mereka seputar pemikiran Islam, Aqidah Islam, syari'ah, akhlak dengan aturan khilafah.¹

Organisasi HTI melaksanakan aktivitas gerakannya terhadap masyarakat guna untuk mencapai cita-cita nya dengan berdirinya negara khilafah islamiyah. Sehingga banyak diantara anggota masyarakat, bahkan termasuk publik figure, pemimpin muslim, politisi, pemimpin militer, wartawan, jurnalis dan para pelayan pemerintah (PNS) tersusupi oleh ideologi khilafah HTI. Strategi mobilisasi dalam menginginkan berdirinya khilafah islamiyah, dimulai dengan

¹ Syaiful Arif, *pandangan dan perjuangan ideologis hizbut tahrir indonesia (hti) dalam sistem kenegaraan di indonesia*, (Aspirasi Vol. 7 No. 1, Juni 2016), 4.

cara memikirkan kembali konsep ummah sebagai perekat dalam mempersatukan umat Islam. Tidak bersatunya Negara-negara Islam karena ummah sebagai identitas politik umat Islam sudah ditinggalkan. Seiring dengan munculnya gagasan *nation-state* dan *nation identity* yang berasal dari Barat. Padahal konsep ummah merupakan cara menyatukan umat Islam dalam mempersatukan ummah secara global dibawah naungan khilafah islamiyah.²

Pembentukan khilafah telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut HTI, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khalifah ini adalah Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijma'* sahabat. Meskipun secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai ini, HTI tidak masuk dalam politik lewat parlemen, melainkan lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat. Selain itu, HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam. Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Dengan demikian, fokus dari perjuangan politik mereka bukan mendapatkan kekuasaan pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan mereka

² Mohamed Nawab Mohamed Osman Source, "*The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia*," South East Asia Research Vol. 18, no. No. 4 (2019): 735–55.

dapat membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat.³

Sebagai implikasi dari konsep khilafah yang dikembangkan oleh HTI struktur dan anggota HTI lebih banyak diterima dikalangan generasi muda terutama diperguruan tinggi. Ide khilafah yang dicita-citakan lebih mudah diterima dikalangan anak-anak muda yang menginginkan terjadinya perubahan secara radikal. Di kampus organisasi sayap kanan HTI dikenal juga dengan Gema Pembebasan dimana aktivitas, ideologi, dan cita-cita yang diperjuangkan sama dengan HTI. Kalangan anak-anak muda yang terdapat dikampus merupakan strategi mobilisasi sumber daya manusia yang sangat potensial dalam mengembangkan gerakan HTI. Mereka melakukan penjangkaran melalui sistem sel yang dikenal dengan fikrah dan didukung juga oleh media online dan cetak dan sumber-sumber digital yang kuat.⁴ Situs-situs tersebut lebih banyak diakses oleh kalangan anak muda. Mereka juga menyebarkan media tersebut melalui masjid-mesjid, sekolah dan lain sebagainya.

Tampaknya jika melihat dari perkembangan organisasi ini, maka terlihat suatu realita bahwa masyarakat sudah mengalami kejenuhan terhadap sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa perubahan pola pemikiran pada masyarakat terjadi disebabkan oleh banyaknya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi oleh para politisi negara. Baik itu penambahan jumlah kriminal, semakin maraknya praktik pungli dilingkungan

³ Bambang Prasetyo, *Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam perspektif Sosial Politik*, (Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 19, No. 2, Juni 2019), 258.

⁴ Mohamed Nawab Mohamed Osman and S., *“Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia’s Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia,”* RSIS Working Paper 171 (2009).

birokrasi hingga maraknya kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi di negara ini. Sehingga dari alasan tersebut memunculkan sebuah paradigma baru hingga teraktualisasi melalui sebuah gerakan dakwah yang diayomi oleh HTI untuk merubah sistem pemerintahan dengan Khilafah al-Islamiyah.

Pemerintah beberapa waktu lalu membubarkan organisasi HTI karena bententangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Orientasi politik HTI dalam mencita-citakan khilafah Islamiyah dianggap bententangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.¹⁴ Islam politik gejala sosial politik di belahan dunia muslim yang berkaitan dengan aktivitas sekelompok individu dengan landasan ideologi yang diyakini bersama. Dalam melihat Islam politik terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan. (1) Aktor yang terlibat, (2), Aktivisme (3), Ideologi.⁵ Sementara Islam kultural adalah gerakan yang lebih mengedepankan Islam sebagai landasan etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti NU dan Muhammadiyah.⁶

Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Perpu No 2 Tahun 2017 sebagai pengganti Undang-Undang No 17 Tahun 2013. Pembubaran organisasi HTI menuai polemik dan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan Negara terhadap keberadaan HTI berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Ada tiga bentuk kebijakan yang diambil oleh Negara terhadap

⁵ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer Konsep, Ideologi, Teori* (Yogyakarta: Suka Press, 2012).

⁶ Zulfadli, *Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan*, (Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 33 No. 2, Desember 2018), 173.

HTI. (1) mengakui HTI sebagai organisasi legal/resmi. (2). Tidak mengakuinya dan juga tidak melarangnya. (3) Melarang aktivitas dan ideologi HTI.⁷

Kebijakan terhadap HTI yang terjadi di Indonesia termasuk dalam bentuk yang ketiga yaitu melarang. Dalam hal ini bagi kalangan yang mendukung dikeluarkan Perpu, pemerintah menyampaikan bahwa alasan dikeluarkannya perpu ormas anti Pancasila dengan alasan Pertama dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tidak dijelaskan secara lebih detail mana saja organisasi atau paham-paham, ideologi, ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua perpu ini diharapkan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mendesak supaya ada kepastian hukum secara tepat. Ketiga karena belum diatur secara lebih jelas dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013 yang mengatur secara lebih detil terkait organisasi anti Pancasila, dikarenakan membuat Undnag-Undang baru membutuhkan waktu yang cukup lama maka dikeluarkan perpu No 17 Tahun 2017.⁸

Pemerintah membubarkan organisasi HTI dengan alasan (1) HTI tidak melaksanakan peran positif dan turut bagian dalam proses pembangunan dan mencapai tujuan nasional. (2) Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat bertentangan dengan prinsip, asas, tujuan, dasar dan ciri yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2013

⁷ Abdul Qohar, *"Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum Dan Sesudah Pembubaran Cepet Tumbuh Berkembang Dan Sangat Jelas Menunjukkan Watak Secara Kuantitas . Gerakan Yang Didirikan Oleh Taqiyuddin an-, "* Kalam Vol. 11, No. 2 (2017): 365–96.

⁸ Reni Rentika Waty, *"Skripsi", Gerakan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan: Studi atas Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UIN Syarif Hidayatullah 2019), 50.

Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (3) Aktivitas yang dilakukan oleh HTI berbenturan dengan masyarakat dan bisa mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan ketutuhan NKRI.⁹

Pasca diputuskannya HTI untuk dibubarkan, maka tantangan sesungguhnya bagi pihak pemerintah Indonesia sendiri adalah harus memastikan bahwa ideologi khilafah juga ikut “terkubur” seiring dengan “terkuburnya” organisasi HTI tersebut. Tentu ini tugas yang sangat berat. Jika mengaca pada pengalaman beberapa negara yang terlebih dahulu HT, faktanya bahwa di beberapa negara, anggota dan simpatisan HT faktanya tetap bertahan dan memegang teguh visinya meski telah dilarang oleh pemerintah. Sebagai contoh, di negara Kirgistan, Kazakstan, Tajikistan, Mesir, Turki, Bangladesh dan Pakistan, eks anggota HT ternyata sampai saat ini masih melanjutkan perjuangan mereka secara terselubung, baik di media sosial atau selainnya, meski telah dinyatakan ilegal oleh pemerintah.¹⁰

Media massa yang digunakan oleh para eks HTI ini terbagi dua yaitu media massa elektronik dan media massa cetak. Pilihan dua jenis media ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Media massa elektronik digunakannya pada saat berdakwah dengan orang yang telah menguasai media seperti di perkotaan. Sedangkan media cetak digunakannya sebagai sarana untuk berdakwah kepada orang-orang yang masih belum menguasai media massa elektronik seperti di perkampungan. Atas dasar itulah, dakwah eks organisasi HTI

⁹ Ibid, 54.

¹⁰ Abdul Qohar, “Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum Dan Sesudah Pembubaran Cepet Tumbuh Berkembang Dan Sangat Jelas Menunjukkan Watak Secara Kuantitas . Gerakan Yang Didirikan Oleh Taqiyuddin an-,” Kalam Vol. 11, No. 2 (2017), 388.

dapat bertahan dengan lajunya arus globalisasi dan modernisasi yang semakin hari kebutuhan orang semakin berkembang. Tidak hanya bertopang pada kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti kebutuhan masyarakat Indonesia dahulu namun telah berkembang serta senantiasa membutuhkan internet sebagai media interaksi sosialnya.¹¹

Paham khilafah islamiyyah, sekalipun menjadi perdebatan dan salah satu organisasinya tetap dilarang, ia tetap menyebar. Salah satunya dengan kemunculan majalah media pembebasan edisi Mei 2022. Majalah ini memuat isu-isu kebobrokan pemerintah yang terselip paham khilafah sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. masalah pemerintahan yang dimuat di dalamnya, antara lain, APBN yang tekor, harga-harga komoditas perekonomian yang naik, hingga anjuran untuk mahasiswa agar bergerak berlandaskan ideologi Islam.¹²

Wacana Khilafah islamiyyah yang tetap menyebar pasca pembubaran HTI, dengan terbitnya majalah-majalah yang mengusung ide khilafah, salah satunya majalah media pembebasan edisi Mei 2022. Tentunya merupakan tantangan dan juga mengharuskan adanya sikap yang keras untuk menghadapi gerakan transnasional ini. Penelitian yang dilakukan ini mengarah pada objek tulisan-tulisan yang terdapat dalam media pembebasan edisi Mei 2022, menggunakan analisis framing sebagai pisau untuk membedah sejauh mana dan sedalam apa tulisan-tulisan tersebut, untuk kemudian dilakukan kritik secara mendalam.

¹¹ Sabari, *Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia, Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol. 11, No. 1, 2017, 6.

¹² Media Pembebasan, *kembali fitri dengan revolusi Islam*, edisi Mei 2022.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas berikut permasalahan yang akan menentukan batasan-batasan permasalahan dalam fokus penelitian ini:

1. Pentingnya memahami gerakan HTI yang bergerak pada Media Masa.
2. Mengetahui gerakan baru yang akan diusung oleh HTI.
3. Menelisik lebih jauh tentang arti *Khilafah Islamiyyah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktifitas eks HTI pasca pembubaran HTI?
2. Bagaimana framing media ideologi Khilafah Islam eks HTI?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk aktifitas eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah.
2. Mengetahui framing media baru yang dibawa oleh HTI.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: Harapan dari hasil penelitian ini mampu dikembangkan lagi lebih lanjut guna memperluas pengetahuan seseorang terkait eks HTI yang masih ada di negara Indonesia dan perkembangan eks HTI dalam bermedia sosial yang dijadikan sarana dakwah dan doktrinisasi ketauhidan dalam bentuk buletin, majalah, kanal Youtube dan jurnal.
2. Praktis: Harapan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh penulis, peneliti atau akademisi selanjutnya, serta bisa menjadikan kemanfaatan oleh masyarakat pada khususnya, agar bisa dipahami

permasalahan yang terkait dengan eks HTI dan bisa menyikapinya dengan baik.

F. Mapping Kajian Terdahulu

Sebelum melanjutkan langkah selanjutnya dalam tahap pembuatan skripsi, penulis telah melaksanakan observasi serta mengkaji pengamatan melalui kajian kepustakaan guna untuk menunjang pembuatan skripsi, serta dijadikan referensi bacaan maupun materi pembahasan nantinya. Hasil rangkuman observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti, sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Publikasi	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Zulfadi	Orientasi Politik Aktivis Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Dibubarkan.	Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 33 No. 2, Desember 2018. (Sinta 2)	Bagaimana langkah selanjutnya dari tujuan politik dan kegiatan eks Hizbut Tahrir Indonesia pasca dibubarkan	Memahami arah gerak politik HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah yang paling utama dari kalangan aktivis yang islamis, para kader dan simpatisan HTI yang berada disekitar kawasan kampus. Meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, namun para simpatisan HTI ini tidak padam tujuan, paham dan segala kegiatannya untuk tetap mendirikan Negara khilafah. Segala aktifitas organisasi HTI sekarang tidak lagi memakai nama HTI setelah pembubaran HTI. Ideologi

					mereka tidak akan mudah hilang apalagi mereka menjadikan ideologi tersebut sebagai sebuah keyakinan. Mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa pasca pembubaran HTI dengan atas nama Gema Pembebasan.
2.	Abdul Qodir	Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran.	Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Agama Islam Vol. 11, No. 2, Desember 2017. (Sinta 2)	Dimana saja ruang gerak Hizbut tahrir sebelum dan sesudah pembubaran	HTI hadir di Indonesia menunjukkan bahwa sistem demokrasi barat yang diterapkan oleh Indonesia adalah sebuah kegagalan dalam demokrasi. Meski telah bubar, para anggota HTI tidak akan mudah menghilangkan ideologinya. Karena penanaman ideologi sangat kuat dalam keyakinan anggota HTI. Bahkan bisa jadi mereka menjelma dalam bentuk ormas baru sebagai ganti nama HTI, mereka akan terus berjuang masuk dalam tubuh ormas Islam yang lain, jikalau ormas Islam lain tidak bisa mempertahankan dan

					memperjuangkan ideologinya.
3.	Syaiful Arif	Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia.	Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial Vol. 7 No. 1, Juni 2016. (Sinta 2)	Apa pandangan dan ideologi yang di bawa oleh Hizbut Tahrir	HTI melaksanakan kegiatan yang isinya tidak setuju dengan keabsahan bangsa, pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Karena pandangan mereka tentang syariah Islam itu sangat kaku dan tidak menerima pendapat yang lain. Syariah yang dipahami oleh mereka sebagai aturan yang berlaku untuk hukum menyeluruh dalam bermasyarakat dengan cara masuk ke dalam struktural negara agar tujuan konsep Khilafah Islamiyyah berdiri tegak syariah Islamnya. Tujuan itu ada karena untuk melahirkan orang yang mencaci dan menjelekkan NKRI, karena Indonesia adalah Negara Modern yang berlandaskan hukum nasional. Oleh karenanya, NKRI jika diganti dengan Khilfah Islamiyyah itu hanya tipu muslihat saja. Atas dasar

					inilah, pemerintah seharusnya segera bersikap atas ideologi HTI ini, karena arah pandangan ideologi dan politiknya menyimpang dengan Pancasila.
4.	Sabari	Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia.	Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies Vol. 11, No. 1 (2017). (Sinta 2)	Bagaimana sistem Hibut Tahrir dalam menggunakan media massa	Buletin Islam di daerah Sambas mempunyai manajemen, bisa disimpulkan mempunyai 3 manajemen, yaitu: 1) Topik yang trending di kalangan masyarakat; 2) Bahasa dan fakta sesuai apa yang sedang dirasakan oleh Masyarakat; 3) Memberikan arahan dan saran untuk membuat kebijakan agar bisa mewujudkan khilafah Islamiyyah diterapkan di peraturan-peraturan daerah.
5.	Bambang Prasetyo	Pembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia dalam Perspektif Sosial Politik	Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. 19. No. 2, Juni 2019. (Sinta 3)	Kenapa Hizbut Tahrir dibubarkan dan seperti apa politik Hizbut tahrir sebelum dibubarkan	Pembubaran Hizbut Tahrir oleh pemerintah pada dasarnya menjadi salah satu bentuk pengawasan pemerintah terhadap suatu ideologi yang dibawa oleh organisasi massa

					yang berada di Indonesia. Organisasi Hizbut Tahrir yang berada di Asia Tengah mempunyai tujuan dan sarat untuk merebut kekuasaan secara paksa terhadap pemerintah. Konsep Hizbut Tahrir pada dasarnya ingin mengembalikan syariat-syariat Islam secara komunikatif. Teori alienasi menjelaskan bahwa sebuah ajaran agama adalah suatu tatanan dalam masyarakat yang dijaga dan dilakukan. Ideologi HTI ini merupakan ideologi Khilafah yang bertentangan dengan ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideologi pancasila.
6.	Muhammad Rafiuddin	Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)	Islamuna: Jurnal Studi Islam Vol. 2, No. 1, Juni 2015. (Sinta 3)	Apa Hizbut tahrir itu dan kenapa Hizbut Tahrir ada	Hizbut Tahrir merupakan organisasi transnasional yang ada dengan tujuan membangkitkan marwah umat Islam dari kemerosotan yang parah. Membebaskan umat Islam dari

					genggaman ide, sistem, perundang-undangan, dan hukum sekuler, yang kemudian bersama membangun kembali Daulah Islamiyyah di muka bumi ini dalam naungan Khilafah Islamiyyah 'ala Minhaj al-Nubuwwah dalam mempraktikkan hukum-hukum dan syariat Islam berasaskan wahyu Allah SWT. Gerakan Hizbut Tahrir tidak sesuai dengan pemahaman mayoritas kaum muslimim yang ada di Indonesia, yaitu: NU, Muhammadiyah dan ormas pribumi lainnya. Inilah salah satu penyebab yang menjadikan ormas pribumi menjaga jarak dari Hizbut Tahrir.
7.	Reni Rentika Waty	Gerakan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan: Studi Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang	Skripsi	Apa yang melandasi Organisasi Hizbut Tahrir dibubarkan	Konsolidasi politik Hizbut Tahrir dilakukan dengan cara melawan hukum dan politik. Bentuk-bentuk konsolidasi politik Hizbut Tahrir diperluas menjadi: 1. Penguatan

		Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan			manajemen organisasi, dengan menggunakan teori manajemen organisasi George R. Terry yaitu, pengorganisasian (<i>organizing</i>) dan penggerakan (<i>actuating</i>). 2. Penyediaan data dan informasi 3. Penguatan kepemimpinan dan kaderisasi. Untuk mencapai proses tersebut ada kendala yang harus dihadapi. Kendala tersebut harus dilalui oleh Hizbut Tahrir dalam meluncurkan konsolidasi Yaitu: 1. Kendala dalam melakukan proses hukum. 2. Kendala dalam berdakwah 3. Kendala dalam mewujudkan cita-cita politik.
8.	Reza Mardhani	Wacana Khilafah pada Kanal Youtube Gema Pembebasan	Skripsi	Bagaimana pola dakwah Hizbut Tahrir dalam bermedia sosial	Secara garis besar, konsep yang dibangun oleh Hizbut Tahrir saat ini menjadi isu yang sedang trending di masyarakat, yakni berupa konsep khilafah Islamiyyah sebagai jawaban dari permasalahan

					yang sedang trending tersebut. Secara gamblang, representasi tersebut menunjukan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di khalayak. Baik itu seorang figur, kebijakan yang menyulitkan, kolonialisme atau bisa disebut dengan asing dan aseng.
--	--	--	--	--	--

Tabel 1.1 (Mapping Kajian Terdahulu)

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan di atas. Meskipun objek umumnya sama, namun metode analisis serta objek materi yang dikaji berbeda. Sehingga penelitian dengan judul “Ideologi Khilafah Islam Pasca Pembubaran HTI oleh Pemerintah: Analisis Framing Terhadap Majalah Gema Pembebasan” memiliki kebaruan dan keunikannya tersendiri.

G. Metodologi Penelitian

Dalam tahap menyelesaikan penelitian ini, penulis memakai metode yang berisi tahapan-tahapan penelitian, agar bisa membantu memudahkan terlaksananya penelitian. Berikut penjelasan metodologi serta tahapan-tahapan penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai bahan penelitian skripsi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih condong memakai analisis, dan juga lebih mencondongkan sebuah makna memakai landasan teori, yang kedepannya dipakai untuk menganalisis dan mengupas sebuah permasalahan atau mengadakan studi kasus yang ada. Penelitian ini juga berdasarkan pada *Libary Research*, untuk membawa dan melanjutkan informasi lebih kongkrit dalam mencari tahap penyelesaian riset. Berlandaskan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba berusaha mengungkap, serta menjawab kasus eks HTI yang bergiat di media sosial, serta bagaimana kasus tersebut jika ditinjau dari kacamata analisis framing.

Pola dan gaya pada penelitian ini terfokus pada objek penelitian yang akan dipaparkan serta dijelaskan dan apa adanya, dengan maksud agar bisa memahami kejadian kasus tersebut, dan bagaimana kasus tersebut bisa langsung dilihat dari kacamata analisis framing.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua bagian, yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. *Pertama* sumber data primer, yakni berupa buletin Gema Pembebasan yang masih aktif dengan jargon khilafah islamiyyahnya. *Kedua* sumber data sekunder yakni analisis framing yang terdapat di jurnal ilmiah buku serta sumber-sumber lainnya yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.

3. Metode Penelitian Data

Penulis mengajukan penelitian ini dalam bentuk deskriptif, sesuai dengan alur pendekatan yang akan dipakai dalam tahap terlaksananya penelitian.

Penulis juga mengumpulkan beberapa data berupa buletin majalah Gema Pembebasan dan merubahnya dalam bentuk kajian naratif-deskriptif, serta penjelasan khilafah islamiyyah sebagai sumber data sekunder, yang bisa ditemukan dari buku, skripsi, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

4. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif akan dijadikan salah satu tahapan dalam pemecahan sebuah masalah yang dipakai guna menganalisis dan menjelaskan segala bentuk eks HTI yang masih bergerak dalam bentuk barunya. Berdasarkan penelitian tersebut, data dan fakta akan dijelaskan sesuai dengan sebagaimana mestinya dan dijelaskan dengan apa adanya.

b. Analisis Historis

Analisis historis dijadikan sebuah pemecahan masalah yang akan datang, yang dijadikan telaah pemikiran tokoh, yang dijadikan penulis sebagai landasan, atau menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yakni teori analisis framing.

c. Analisis Kritik

Analisis kritik ini akan dijadikan penulis dalam tahap selanjutnya, untuk menyelidiki dan mengkritik sumber-sumber data yang sudah didapatkan sehingga data yang dilampirkan bisa dikatakan layak menjadi penunjang dari penelitian ini.

H. Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk penelitian ini adalah adalah teori Analisis Framing. Objek yang diteliti adalah sebuah teks berbentuk majalah yang berisi tulisan-tulisan pendek tentang urgensi kembali kepada Islam sebagai sebuah sistem bernegara. Analisis Framing, dalam hal ini, sangat kompatibel untuk digunakan sebagai pisau analisis, sebab analisis framing hendak meneliti esensi dibalik apa yang tampak yang coba untuk lebih ditonjolkan pada sebuah tulisan.

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing yakni melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksikan oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak.¹³

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1995. Mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan wacana kategorikategori standar untuk mengapresiasi realitas.¹⁴

Menurut Sudibyo Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan

¹³ Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : LKIS,2002), 10

¹⁴ Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung (2009) Remaja Rosdakarya. 9.

secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konolasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.¹⁵

Dalam prespektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai prespektifnya. Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirancang dan diselesaikan oleh penulis dengan judul “Ideologi Khilafah Islam Pasca Pembubaran HTI oleh Pemerintah:(Analisis Framing Terhadap Majalah Gema Pembebasan)” yang nantinya disusun oleh penulis dalam beberapa bab. Susunannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, penulis menjelaskan sebuah pendahuluan yang dijadikan sebagai subansi penelitian, berikut rincian yang akan dijelaskan oleh penulis, yaitu: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, landasan teori, serta metodologi penelitian.

¹⁵ Kariyanton, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri (2006), 12.

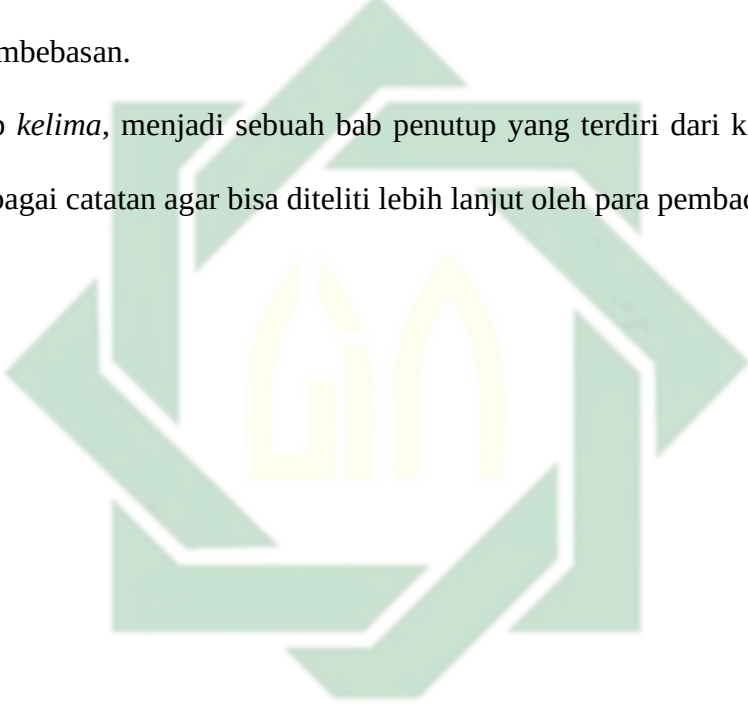
¹⁶ Sobur,. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung (2009) Remaja Rosdakarya, 13.

Bab *kedua*, penulis menjelaskan definisi dan ideologi yang dibawa oleh kelompok HTI secara umum dan analisis framing.

Bab *ketiga*, penulis menjelaskan teori analisis framing yang berkaitan dengan majalah Gema Pembebasan.

Bab *keempat*, penulis menjelaskan analisis framing dari arah gerak buletin Gema Pembebasan.

Bab *kelima*, menjadi sebuah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, sebagai catatan agar bisa diteliti lebih lanjut oleh para pembaca.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KHILAFAH ISLAMIYYAH DAN FRAMING

A. Definisi dan Sejarah Khilafah Islam

Ada beberapa definisi atau pengertian dari Khilafah. Beberapa tokoh juga mendefinisikan Khilafah sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang Khilafah, peneliti terlebih dahulu akan menjabarkan definisi atau pengertian Khilafah dari berbagai tokoh. Khilafah Islam adalah sistem politik yang terbangun dari ideologi Islam, di dalamnya memuat aturan-aturan hukum Islam, pemerintah representatif, akuntabilitas masyarakat melalui mahkamah independen dan prinsip konsultasi representatif. Sistem pemerintahan Khilafah ini adalah pemerintahan yang dibangun di atas konsep kewarganegaraan tanpa melihat etnis, gender, dan kepercayaan yang sepenuhnya untuk menentang perlakuan represif terhadap kelompok religius dan etnis.¹⁷

Maksud dari definisi Khilafah di atas adalah mampu menjadikan sistem pemerintahan yang menganut syari'at Islam dan mengutamakan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, sistem pemerintahan yang menganut hukum Islam dan memberikan solusi bagi permasalahan umat Islam saat ini, pemerintahan yang tidak memandang dari segi budaya, suku, dan ras.

Sedangkan menurut Ali Abdur Raziq, definisi Khilafah secara etimologi yang dipahami oleh umat Islam ialah sesuatu yang wajib ditaati, sesuatu yang pasti, keimanan seseorang akan goyah kecuali dengannya dan keislaman

¹⁷ Idil Akbar, “*Khilafah Islamiyah; Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi)*”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, (April 2017), 97.

seseorang tidak kukuh kecuali di atasnya.¹⁸ Menurut pendapat Al-Baidhawi, Khilafah adalah statemen yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah SAW oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang sesuai syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang harus diikuti oleh umat Islam.¹⁹

Tokoh berikutnya yang memberikan gagasannya mengenai Khilafah adalah Rakhmat S Labib menjelaskan Hadist tentang Al-Khilafah ala minhaj al-nubuwwah: Istilah Khilafah berasal dari Rasulullah. Dijelaskan dalam hadist riwayat Imam Ahmad yang memberitahukan periodisasi kepemimpinan umat Islam. Setelah masa nubuwwah, umat Islam akan mengalami era al-Khilafah ala minhaj al-nubuwwah. Selanjutnya mulk „adud, yang artinya kekuasaan yang menggigit. Kemudian mulk jabariy, yang artinya kekuasaan diktator, setelah itu berakhir, kemudian kembali lagi al-khilafah ala minhaj al-nubuwwah. Ini tertuju pada sistem pemerintahannya.²⁰

Dalam Al-Qur'an sudah tertulis bahwa janji suci Allah dan Rasulullah SAW tentang legilitas khilafah sebagai sesuatu sistem politik yang direstui seperti pada QS. An-Nur [24]: 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

¹⁸ Kamil Sa'fan, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam; Tinjauan Kritis atas Pemikiran Politik Ali Abdur Raziq*, (Mesir: Erlangga, 2009), 85.

¹⁹ Azrul Hakim, *"Konsep Pemerintahan Dalam Islam (Studi Terhadap Pemerintahan Khilafah Menurut Ali Abdur Raziq)"*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 9.

²⁰ Muhammad Rikza Muqtada, *"Hadis Khilafah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017"*, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), 10.

Artinya: “Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik..”²¹

Definisi di atas dapat dipahami bahwa Khilafah Islam adalah sebuah sistem pemerintahan yang berbasis Islam dan di dalamnya mengandung unsur aqidah, fiqih, dan syari’ah Islam. Khilafah Islam pertama kali dikenalkan oleh gerakan Islam Hizb al-Tahrir (HT). Dilihat dari sejarahnya, sistem pemerintahan Khilafah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya hingga tahun 1924.²² Pada zaman Rasulullah SAW sudah terlihat sistem pemerintahan Islam pada waktu itu.

Allah SWT memberikan tugas kepada Rasulullah SAW sebagai Khalifah pertama di dunia Islam. Pada zaman Rasulullah SAW sudah terlihat jelas sistem pemerintahan Khilafah, karena dilihat dari lingkungan negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi yang mayoritasnya penganut agama Islam walaupun dahulu masih ada penduduk pengikut kaum Quraisy akan tetapi hal itu tidak membuat Rasulullah SAW menyerah dalam menghadapi tantangan untuk menegakkan agama Islam di sana karena amanah yang diberikan oleh Allah SWT dalam menjalani tugasnya sebagai Nabi. Pada saat Rasulullah menjalankan tugasnya, selalu ada ujian yang datang yaitu yang menentang Rasul seperti kaum penyembah berhala, kaum kafir Quraisy.

²¹Alqur’an

²² Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), 2.

Pengorbanan Rasulullah yang sangat luar biasa itu selalu dalam lindungan Allah, walaupun pada saat Rasul menjalankan tugas kenabiannya, Rasul pernah rahangnya patah, pelipisnya berdarah, lututnya berdarah hanya demi berjuang untuk melawan kaum kafir Quraisy yang selalu menghalangi jalannya Rasulullah saat beliau sedang berdakwah dan menjalankan amanah dari Allah, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan Rasulullah dalam menegakkan sistem pemerintahan Islam di sana dan mengajak kaum yang belum memeluk Islam menjadi kaum yang menganut agama Islam dengan cara berdakwah secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi dan tidak memaksa kaum Quraisy untuk memeluk agama Islam karena Rasulullah SAW tidak ingin memaksakan kehendak orang lain.

Apabila kaum Quraisy ingin memeluk Islam dan mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, Rasul sangat senang karena dakwahnya berhasil untuk mengajak orang-orang yang sebelumnya mengikuti jejak yang salah dengan menyembah berhala akhirnya berhasil mengajak kepada kebenaran yaitu menyembah Tuhan (Allah SWT). Hal itu yang membuat Rasulullah SAW adalah sebaik-baik pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.²³

Sejarah dunia menyatakan bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang bisa menjadi suri tauladan, pemimpin yang sederhana, berwibawa, tegas dan terutama pemimpin Islam yang bisa menjadi contoh dalam kepemimpinan di dunia. Hal ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yaitu Khulafaur Rasyidin diantaranya Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab,

²³ Cecep Supriadi, *"Relasi Islam dan Negara; Wacana Keislaman dan Keindonesiaan"*, Jurnal Kalimah, Vol. 13, No. 1, (Maret 2015), 203.

Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang semuanya bijaksana dalam memimpin.

Pada pertengahan Abad XIII M Baghdad mengalami kemerosotan yang luar biasa dan mengakibatkan runtuhnya di berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan, pendidikan dan sosial-politik. Saat itu bangsa Mongol menyerang kerajaan Islam di saat kerajaan Islam mengalami kejayaannya. Sebuah negara pasti ingin menjadi negara yang maju dan bisa mengatasi berbagai problematika umum dalam pemerintahan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Pada tahun 1928, Hasan Al-Banna mendirikan Khilafah Islamiyah yang pertama kalinya dengan mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin. Didirikannya sistem pemerintahan Khilafah ini karena ingin mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh umat Islam saat itu, akan tetapi gerakangerakan tersebut dijauhi oleh negara-negara lain terutama di negara Islam karena dianggap sebagai gerakan radikalisme Islam. Namun Khilafah Islam saat ini sudah menyebar luas ke berbagai negara terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.²⁴

Khilafah Islam diterapkan di negara-negara Islam terutama di Indonesia. Saat ini masih sangat marak dalam memperbincangkan Khilafah sebagai sistem pemerintahan di sini. Pembahasan tentang Khilafah pasti tidak asing ditelinga khalayak umum tentang HT (Hizb at-Tahrir). Hizb at-Tahrir (HT) yaitu Pemeran utama penegak Khilafah Islam di negara-negara yang berbasis Islam di seluruh dunia. Hizb at-Tahrir Tahrir (HT) didirikan pada tahun 1953, di Al-Quds

²⁴ Indra Utama Tanjung, “*Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 9, NO. 1, (2018), 113.

Palestina.²⁵ Para penegak Khilafah Islam khususnya Hizb At-Tahrir (HT), Di Indonesia dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir (HT) masuk ke Indonesia pada tahun 1980 yang dipimpin oleh Abdul Rahman Al-Baghdadi dan memperkenalkan namanya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2000. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan sasaran penting tegaknya Khilafah Islam di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya konferensi Khilafah internasional pada 28 Mei 2000, kemudian dilanjutkan dengan konferensi kedua pada 12 Agustus 2007 dengan melalui surat terbuka, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajak presiden yang menjabat pada waktu itu ialah presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia.²⁶

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat antusias untuk menegakkan Khilafah Islam di Indonesia karena melihat lingkungan Ibu pertiwi ini mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, selebihnya adalah penganut agama non muslim, terhitung untuk saat ini penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam adalah 85%. Maka dari itu mereka ingin menguasai Indonesia dengan cara ditegakkannya Khilafah di negeri ini.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sangat ambisi untuk melakukan gerakan Khilafah Islam di Indonesia karena menurut mereka jika Khilafah Islam menjadi sistem pemerintahan di Indonesia dapat menjadi solusi atas jawaban dari masalah-masalah di Indonesia saat ini karena saat ini umat Islam dihadapkan

²⁵ Muhammad Rikza Muqtada, *“Hadis Khilafah dan Relasinya Terhadap Kontestasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca-Perpu Nomor 2 Tahun 2017”*, Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 8, No. 1, (Juni 2018), 4.

²⁶ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, 5.

pada sebuah masalah yang luar biasa. Supaya terhindar dari problematika sosial, solusinya adalah berislam dengan menjalankan Islam secara kaffah. Berislam secara kaffah adalah salah satu kewajiban dalam ajaran Islam karena mengandung makna mengamalkan syari'at Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan yang diajarkan. Baik dilihat dari hubungan manusia kepada Allah SWT (*hablumminallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Termasuk juga dalam hal pemerintah seperti masalah ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan tata cara bernegara.²⁷

B. Peran Ideologi Khilafah Islam Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia

Khilafah adalah sebuah ideologi menurut Hizbut Tahrir Indonesia ialah suatu keyakinan atau akidah yang didasarkan pada rasionalitas untuk menghasilkan aturan-aturan bagi manusia. Bangunan nalar Khilafah diperkuat oleh suatu kontruksi Islam sebagai ideologi. Dalam hal ini, makna akidah yang didasarkan pada rasionalitas adalah pemikiran yang komprehensif dilihat dari kehidupan manusia, fenomena alam, tumbuhan dan hewan, alam semesta. Sedangkan aturan yang berasal dari akidah adalah berupaya memberikan solusi untuk memecahkan sebuah problem bagi kehidupan manusia di bumi ini seperti cara penyelesaian, penjagaan akidah serta penyebaran ideologi.²⁸

Menurut Hizb At-Tahrir, ideologi yang sebenarnya adalah ideologi yang berdasarkan Islam. Mereka menegaskan bahwa ideologinya adalah Islam bahkan

²⁷ Cecep Supriadi, "*Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*", Jurnal Kalimah, Vol. 13, No. 1, (Maret 2015), 204.

²⁸ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, 116.

Islam merupakan harga mati bagi kelompok yang dipelopori oleh Taqiyuddin Al-Nabhani. Hal ini terlihat jelas pada visi dan misi yang menegaskan bahwa Hizb At-Tahrir berideologi Islam. Dalam kitab *Nidzam al-Islam* sebagai kitab pertama Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani menjabarkan ideologi yang ada di dunia ini, diantaranya adalah Kapitalisme, Sosialisme (Komunisme), dan Islam.²⁹

Ideologi kapitalisme berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya sehingga lahirlah ide demokrasi serta kapitalis. Kapitalisme berdiri tegak atas dasar pemisahan agama dan sekularisme. Kedua ialah sosialisme (komunisme) memandang bahwa segala hal yang ada di dunia ini seperti manusia, alam semesta, dan kehidupan adalah materi. Materi ini menjadi asal dari semuanya yang ada di bumi ini. Terakhir adalah ideologi Islam. Ideologi Islam berbeda dengan kedua ideologi di atas karena Islam memandang bahwa dibalik alam semesta dan makhluk hidup terdapat Pencipta dari semua yang hidup yaitu Allah SWT.³⁰ Ideologi ini dipegang teguh oleh kalangan Hizb At-Tahrir hingga saat ini.

Khilafah merupakan bagian dari *mabda'* yang harus diwujudkan. Maka dari itu, tegaknya *al-dawlah al-islamiyah* bergantung pada *mabda'* Islam. *Mabda'* adalah sebutan lain dari ideologi, sebutan *mabda'* biasa digunakan oleh kalangan islamisme. *Mabda'* terdiri dari dua unsur yakni fikrah dan thariqah. Fikrah adalah solusi pemecahan terhadap problematika yang dihadapi oleh manusia, sedangkan thariqah adalah cara melaksanakan dan menjaga ideologi atau *mabda'* dan memaparkan bahwa ajaran Islam yang berisi tentang

²⁹ Mohammad Rafiuddin, "*Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)*", Jurnal Islamuna, Vol. 2, No. 1, (Juni 2015), 38.

³⁰ Ibid., 42.

penjelasan mengenai cara-cara mengemban dakwah seperti penjelasan Hizb At-Tahrir.³¹

Khilafah sebagai ideologi Islam saat ini juga banyak yang mendukung bahwa salah satu jawaban dan solusi atas problematika atau masalah yang dihadapi seluruh manusia di bumi ini adalah dengan cara menegakkan Khilafah Islam sebagai sistem pemerintahan di negara-negara yang ada di dunia ini, khususnya di negara Islam karena Khilafah Islam sudah sejak dari zaman Rasulullah sudah menjadikan Khilafah sebagai sistem kepemimpinannya bahkan juga sistem pemerintahannya.

Banyak yang beranggapan bahwa kelompok Hizbut Tahrir mengajak untuk menegakkan Khilafah adalah dengan cara memaksa, hal itu adalah ambisi dari para kelompok tersebut. Bisa dilihat bahwa Hizbut Tahrir membawa pada pemerintahan yang autokratik, yang artinya sistem pemerintahan dan kekuatan tertinggi yang terkonsentrasi pada satu tangan seseorang. Artinya, pemerintahan yang dikendalikan oleh seseorang dengan seumur hidup.³²

Segi utama dari autokrasi adalah sebagai berikut: pertama, banyak para autokrat yang mendasarkan peraturannya pada penghasutan rakyat, kedua, autokrasi sering melahirkan pada kekuatan dan pemaksaan, ketiga, kekuatan senjata menopang autokrasi.³³

Membahas tentang Khilafah Islamiyah pasti tidak lupa dengan bendera Hizb at-Tahrir (HTI) yakni al-liwa dan al-rayah. Al-liwa bendera yang berwarna putih

³¹ Ainur Rofiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, 117.

³² Ainur Rofiq Al Amin, "*Kritik Pemikiran Khalifah Hizbut Tahrir yang Autokratik*", Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Vol. 7, No. 2, (Desember i2017), 471

³³ Ibid, 472.

sedangkan al-rayah bendera yang berwarna hitam yang masing-masing bendera terdapat tulisan kalimat tauhid. Perbedaan al-liwa dan al-rayah adalah al-liwa menjadi pertanda posisi amir atau komandan pasukan dan turut beredar sesuai peredaran amir atau komandan pasukan, sedangkan al-rayah berada bersama para komandan bagian-bagian pasukan (skuadron, detasemen, dan satuan-satuan pasukan yang lain).³⁴ Motivasi Hizb At-Tahrir (HTI) dalam menegakkan Khilafah Islamiyah adalah atas dasar Al-Qur'an Surah An-Nur: 55

Artinya: "Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik."

Bahkan mereka para kelompok HTI menjustifikasi bahwa dosa besar dan goyahnya akidah bagi yang mengingkari Khilafah. Dalam persepsi mereka hukum mengingkari Khilafah sama saja dengan orang yang mengingkari kewajiban shalat, zakat, haji, dan jihad.³⁵

Pemimpin Hizb Tahrir Internasional yakni Abu Rashtah, beliau menghadiri acara Mukhtar Ulama Nasional (MUN). Dalam sambutannya di Jakarta pada 21 Juli 2009 mengatakan bahwa tegaknya Khilafah bukan sekedar persoalan utama yang menjamin kemuliaan umat dan rahasia kekuatannya saja melainkan juga pertama dan terakhir dari berbagai yang lain. Hal serupa juga dinyatakan oleh Imran Wahid selaku juru bicara Hizb Al-Tahrir di Kerajaan Inggris dalam

³⁴ Nilda Hayati, "Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia; Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi", Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 1, (Juni 2017), 181-182, 32.

³⁵ Ibid, 183.

konteks Khilafah sebagai ideologi alternatif dunia mengkritik thesis Fukuyama yang mensinyalir dunia telah berada pada the end of history, sebab tidak ada lagi ideologi alternatif yang aktif untuk menggantikan kapitalisme dan peradaban Barat. Imran Wahid ingin membuktikan bahwa pernyataan Fukuyama dalam thesisnya itu salah.³⁶

C. Analisis Framing

1. Analisis framing

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksikan realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing yakni melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksikan oleh wartawan dan media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak.³⁷

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1995. Mulanya framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan wacana kategorikategori standar untuk mengapresiasi realitas.³⁸

Menurut Sudibyo Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan

³⁶ Ainur Rafiq Al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah*, 162.

³⁷ Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : LKIS, 2002), 10.

³⁸ Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung (2009) Remaja Rosdakarya. 13.

secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konolasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.³⁹

Dalam prespektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai prespektifnya. Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.⁴⁰

Ada bebrapa definisi framing dalam Eriyanto. Definisi tersebut dapat diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Meskipun berbeda dalam penekanannya dan pengertian. Masih ada titik singgung utama dari definisi tersebut, yaitu antara lain:

- a) Menurut Robert Entman. Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasiinformasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.
- b) Menurut Todd Gitlin. Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol

³⁹ Kariyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri

⁴⁰ Sobur.. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung (2009): Remaja Rosdakarya, 23.

dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.

- c) Menurut David Snow dan Robert Benford Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan mewujudkan dalam kata kunci tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dalam kalimat tertentu.
- d) Menurut Zhongdang dan Pan Konsicki. Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. (Eriyanto, 2011: 67-68).⁴¹

Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian bagian lain yang disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada suatu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media.

2. Seleksi Isu dan Penekanan

Isu Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-

⁴¹ Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : LKIS,2002), 58.

aspek tertentu yang disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khakayak.

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta/realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tahap perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu terkandung dua kemungkinan; apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). Bagian mana dari fakta yang didapatkan di lapangan yang akan diberitakan dan mana yang tidak akan diberitakan.

Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih angel tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. Akibatnya, pemahaman dan konstruksi atas suatu peristiwa bisa jadi berbeda antara satu media dengan media lain. Media yang menekankan aspek tertentu, memilih fakta tertentu akan menghasilkan berita yang bisa jadi berbeda kalau media menekankan aspek atau peristiwa yang lain.

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu; penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan, atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi

terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang mencolok, gambar dan sebagainya.⁴²

Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto itu merupakan implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas. Akibatnya, aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol, lebih mendapatkan alokasi dan perhatian yang besar dibandingkan aspek lain.

D. Model Analisis Framing Robert N. Entman

Konsep framing oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan: membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak.

Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam; menempatkan satu aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran frame dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai

⁴² Eriyanto, *Analisis Framing*, (Yogyakarta : LKIS,2002), 70.

pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak.⁴³

Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan atau bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi dan lain-lain. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak.

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh para wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.⁴⁴

Perangkat framing Robert N. Entman

Tabel 2.1: Perangkat framing Robert N. Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana
-------------	---

⁴³ Eriyanto, Analisis Framing, (Yogyakarta : LKIS,2002), 186.

⁴⁴ Zikri Fachrul Nurhadi, Teori-teori Komunikasi: Teori Komunikasi dalam Perspektif Penelitian Kualitatif, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 91.

	yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (incuded), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak

Dan dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasa, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Secara lebih jelas, akan digambarkan sebagai berikut. Konsep framing Robert N. Entman Tabel 2.2: Konsep framing Robert N. Entman

Define problems (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai suatu penyebab masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make moral judgement (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi

recommendation (menekankan penyelesaian)	masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
--	--

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Dibalik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.⁴⁵

Framing, kata Entman, memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Frames menurutnya, menuntut perhatian terhadap beberapa aspek dari realitas dengan mengabaikan elemen-elemen lainnya yang memungkinkan khalayak memiliki reaksi berbeda. Framing memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik, dan frame dalam teks berita merupakan kekuasaan yang tercetak, menunjukan identitas para aktor atau interest yang berkompetisi untuk mendominasi teks.

Namun Entman menyayangkan, banyak teks berita dalam merefleksikan permainan kekuasaan dan batas wacana atas sebuah isu, memperlihatkan homogenitas framing pada satu tingkat analisis, dan belum mempersaingkannya dengan framing lainnya. Konsep framing, dalam pandangan Entman, secara

⁴⁵ Eriyanto, *Analisis Framing*, 168

konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text. Framing analisis dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, news report, atau novel.



BAB III

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN PROPAGANDA

A. Profil Organisasi Hizbut Tahrir

1. Sejarah berdirinya Hizbut

Tharir Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.⁴⁶ Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt sebagaimana diuraikan dalam QS. Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga

⁴⁶ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Cet.IV; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), 4.

membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.

Menurut Hizbut Tahrir, menegakkan Khilafah ar-Rasyidah yang akan menerapkan syariah secara total adalah wajib. Kewajiban itu dinyatakan dalam banyak nash baik al-Quran, Hadis Nabi saw. maupun Ijma Sahabat. Rasulullah saw. memberikan kabar gembira bahwa Khilafah ‘ala Minhaj an-Nubuwwah akan kembali lagi. Imam Ahmad di dalam Musnad-nya berkata: Telah berkata Abdullah; telah berkata bapakku; telah berkata Sulaiman bin Dawud ath-Thayalisi; telah berkata Dawud bin Ibrahim al-Wasithi; telah berkata Habib bin Salim dari Nu‘man bin Basyir bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

فَتَكُونُ النَّبُوءَةُ نَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مَنَاجِ
النَّبِوءَةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصِمًا فَيَكُونُ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَتَكُونُ نَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ
يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعُهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَى مَنَاجِ النَّبِوءَةِ

Di tengah-tengah kalian ada zaman Kenabian. Atas kehendak Allah zaman itu akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkat zaman itu jika Dia berkehendak mengangkat-nya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj Kenabian. Khilafah itu akan tetap ada sesuai kehendak Allah. Lalu Dia akan mengangkat Khilafah itu jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (pemerintahan) yang zalim. Kekuasaan zalim ini akan tetap ada sesuai kehendak Allah. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (pemerintahan) diktator yang menyengsarakan. Kekuasaan diktator itu akan tetap ada sesuai kehendak Allah. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan muncul kembali Khilafah yang

mengikuti manhaj Kenabian. (Hudzaifah berkata): Kemudian beliau diam (HR Ahmad dan al-Bazzar).⁴⁷

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.⁴⁸

2. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibi'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-

⁴⁷ Hadis Tentang Bakal Kembalinya Khilafah, <http://hizbut-tahrir.or.id/2014/12/02/dhaifkah-hadis-tentang-bakal-kembalinya-khilafah/> (Akses 26 Desember 2022), 4.

⁴⁸ Hizbut Tahrir, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentangkami>, 3.

negara dan bangsabangsa di dunia ini. Negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari‘at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.⁴⁹

Menurut Dirwan A.Jalil, Hizut Tahrir berupaya agar kehidupan Islam itu bisa berlanjut, dalam arti seluruh tatanan kehidupan diatur dalam Islam, tidak ada paksaan sesuai ajaran Islam. Menyentuh pemikiran masyarakat mengenai amar ma’ruf nahi mungkar untuk menghilangkan kemungkaran dengan lisan atau tulisan, atau dengan hati, bagaimana mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya sendiri, dan manusia dengan sesamanya. Aspek politik, sosial, ekonomi pendidikan, institusi yang melaksanakan hal itu. Hizbut Tahrir bukan dakwah kekerasan tapi menggugah pemikiran masyarakat.

3. Kategorisasi Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir

Berdasarkan keragaman informasi yang dihimpun peneliti, baik data studi dokumen maupun wawancara dan observasi, secara garis besar gerakan dakwah Hizbut Tahrir dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu gerakan dakwah yang berkonteks lapangan dan gerakan dakwah berbasis multimedia.

a. Kategori Dakwah Berkonteks Lapangan

Dalam melakukan transformasi pemikiran, Hizbut Tahrir menerapkan aksi dan perjuangan politik sebagai metode dan alat sosialisasi gerakannya. Bentuk

⁴⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*, 26.

aksi misalnya berupa unjuk rasa, pengiriman delegasi ke berbagai Kedubes, dan audiensi ke lembaga-lembaga tertentu negara. Aksi demonstrasi biasanya digelar secara serempak atau beruntun diberbagai kota di Indonesia.

Selain itu Hizbut Tahrir juga menggelar berbagai diskusi, kajian, dan pertemuan yang menjadi konsentrasi utama para anggotanya. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan umum kepada masyarakat sekaligus menjaring calon anggota. Kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua pola. Pertama, yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah kepanitiaan dan merupakan program rutin organisasi yang dikoordinasi secara terpusat dan melibatkan mobilisasi seluruh anggota. Kedua adalah kegiatan yang diprakarsai oleh para anggota dan hanya melibatkan partisipasi sukarela.

Bentuk dan jenis kegiatan dakwah Hizbut Tahrir pada umumnya bersifat situasional. Kegiatan dakwah di lingkungan intelektual biasanya berbentuk seminar sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat awam biasanya berbentuk tabligh akbar, bedah buku, atau kegiatan lain yang bersifat terbuka.

b. Kategori dakwah berbasis Multimedia.

Berdasarkan temuan data observasi dan hasil studi dokumen, diketahui bahwa Hizbut Tahrir memiliki ragam media (multimedia) yang mengakomodasi pesan dakwah anggota Hizbut Tahrir maupun pihak eksternal (da'i atau Ormas Islam). Terbitnya media Hizbut Tahrir di Indonesia didasari tujuan agar dakwah yang disampaikan Hizbut Tahrir semakin meluas dan agar jangkauan informasi dapat dilihat lebih banyak pembaca. Secara garis besar ragam bentuk media Hizbut Tahrir tersebut dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Pertama; kategori

media konvensional berupa media penerbitan (majalah, bulletin, tabloid dan buku) serta media penyiaran (televisi dan radio), Kedua; kategori new media berupa website dan social media.

1) Media Konvensional

Media konvensional dalam konteks penelitian ini adalah media penerbitan (majalah, bulletin, tabloid dan buku) dan media penyiaran (televisi dan radio) yang dimiliki atau dikelola Hizbut Tahrir. Berdasarkan temuan data observasi di lapangan, diketahui ragam bentuk media konvensional (penerbitan dan penyiaran) yang dimiliki Hizbut Tahrir. Misalnya, Bulletin Al-Islam sudah tidak asing bagi jamaah masjid karena selain dibagikan secara gratis setiap hari jum'at di seluruh daerah juga menyampaikan isu-isu sosial kontemporer.

Multimedia Hizbut Tahrir diciptakan karena segmentasi pembaca berbedabeda. Majalah Al-Wa'ie cenderung disukai oleh orang-orang yang berpendidikan menengah ke atas (bacaan berat) atau yang senang dengan ulasan lebih mendalam. Sedangkan Tabloid Al Ummat lebih mengarah ke news atau berita, yang bacaannya lebih ringan, lebih santai dan dapat dimengerti oleh semua pihak. Bulletin Al-Islam diperuntukkan khusus untuk jama'ah masjid agar memberi respon mengenai kondisi Indonesia terhadap kebijakan pemerintah. Perkembangan multimedia Hizbut Tahrir kini dapat dirasakan dan mengalami pertumbuhan secara terus menerus.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah oplah yang terus meningkat, menunjukkan banyaknya minat dari masyarakat yang membaca baik Bulletin Al-Islam ataupun Majalah Al-Wa'ie tersebut. Respon itu dapat dilihat dari

perkembangannya yang secara konsisten, karena Buletin Attaupun Majalah yang di terbitkan tersebut dapat terus terbit. Dari hasil jual ke para peminatnya tersebut kemudian dananya terus digunakan dalam percetakan

2) New Media

Berdasarkan temuan data observasi dan hasil studi dokumen, diketahui bahwa Hizbut Tahrir juga mempublikasikan ragam informasi melalui media internet. Ragam informasi tersebut antara lain menyajikan informasi terkait aktivitas dan kegiatankegiatan Hizbut Tahrir baik yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia maupun di lunegeri, informasi atau pesan dakwah kepada masyarakat hingga berbagai kritikan atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan orientasi sistem khilafah.

Dengan kata lain keberadaan website dan media sosial Hizbut Tahrir tersebut menunjukkan kekuatan organisasi ini dalam hal penguasaan media berjejaring internasional sebagai bentuk counter hegemony media mainstream barat yang intens mempropagandakan paham liberalisme (kontra pemikiran Hizbut Tahrir) Selain itu Hizbut Tahrir melalui website maupun akun media sosialnya gencar mentransformasikan pesan penegakan sistem pemerintahan khlilafah sebagai substitusi sistem pemerintahan demokrasi. Secara eksplisit hal itu tampak pada pemilihan tema-tema yang dikonstruksi Hizbut Tahrir baik pada berita, artikel, opini diberbagai website dan media sosial.

B. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1. Langkah Pemerintah Terhadap Pembubaran HTI

Pembubaran HTI diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pembubaran tersebut dilakukan sebagai suatu komitmen terhadap Nawacita, yang mana di dalamnya terkandung komitmen pemerintah untuk mengembangkan demokrasi, nasionalisme, kebhinekaan, konstitusi dan Pancasila.⁵⁰

Presiden Joko Widodo menyampaikan sebuah pernyataan bahwa pada pemerintahan Jokowi-JK memiliki program dan langkah-langkah untuk merevitalisasi demokrasi dan nasionalisme. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang mengganggu ideologi Pancasila.

Kemudian, sejalan dengan pernyataan tersebut Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk melakukan kajian terhadap ormas yang memiliki paham yang bertentangan dengan Pancasila. Setelah beberapa waktu melakukan kajian, Kemenkopolhukam menemukan bahwa ajaran yang disebarluaskan HTI bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, demokrasi dan HAM.⁵¹

Pada tanggal 8 Mei 2017 Kemenkopolhukam memberikan pengumuman tentang rencana pembubaran HTI yang dilandasi dengan 3 alasan. Pertama, HTI tidak berperan secara positif dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Negara. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau diselenggarakan HTI terindikasi bertentangan dengan asas dan tujuan negara. Ketiga, aktifitas

⁵⁰ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: IPPS, 2017), 125.

⁵¹ Ibid., 127.

yang dilakukan berbenturan di masyarakat, sehingga dapat mengancam keamanan, ketertiban dan membahayakan NKRI.⁵²

Senin, 10 Juli 2017 pemerintah menerbitkan Perppu Nomor Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 HTI resmi dibubarkan dengan pencabutan status badan hukum.

2. Dasar Hukum Pembubaran HTI

a. Undang-undang Dasar

Dalam menangani HTI pemerintah merujuk kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adanya UU tersebut adalah untuk mendorong semangat kebebasan berdemokrasi, sehingga muncul organisasi masyarakat yang menjadi komponen penting dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia.

Namun, UU ini dianggap tidak dapat dijadikan instrumen yang cepat dalam menangani ormas-ormas yang membahayakan negara.⁵³ Sehingga pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013, yang ditetapkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang yang disahkan pada 22 November 2017.

⁵² Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: IPPS, 2017), 128.

⁵³ Ibid., 147

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPPU)

Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 22 ayat 1 mengamanatkan tentang Perppu, bahwasannya dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang.

Berdasarkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi presiden dapat mengeluarkan Perppu berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu:⁵⁴

- 1) Ketika sedang dalam keadaan mendesak dan perlu diselesaikan secara cepat.
- 2) Adanya kekosongan dan kelemahan hukum, undang-undang tidak memadai untuk menjadi landasan bagi penyelesaian persoalan negara.
- 3) Prosedur atau regulasi pembuatan penetapan peraturan yang terlalu lama sementara permasalahan harus segera diatasi atau mendesak.

Dengan dasar pertimbangan di atas maka penggunaan Perppu dinilai tepat karena telah mencakup tiga pertimbangan tersebut. Bukti empiris yang berkaitan terhadap pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Ketika sedang dalam keadaan mendesak dan perlu diselesaikan secara cepat.
 - a) Kemenkopolhukam telah mengumpulkan bukti kuat bahwa HTI menentang Pancasila atau ideologi bangsa, apabila tidak segera dilakukan tindakan maka penyebaran ideologi HTI akan terus berlanjut dan semakin meluas.

⁵⁴ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: IPPS, 2017), 144.

⁵⁵ Ibid., 145.

- b) Terjadi penolakan terhadap gerakan HTI hampir di seluruh daerah-daerah Indonesia, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial.
- 2) Adanya kekosongan dan kelemahan hukum, undang-undang tidak memadai untuk menjadi landasan bagi penyelesaian persoalan negara. Yang dimaksudkan sebagai kekosongan atau kelemahan hukum adalah pada UU Nomor 17 Tahun 2013, karena UU tersebut tidak memuat dengan jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi.
- 3) Prosedur atau regulasi pembuatan penetapan peraturan yang terlalu lama sementara permasalahan harus segera diatasi atau mendesak. Dalam kaitannya terhadap pembubaran apabila menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2013 sebagai landasan dalam menangani kasus ini maka pemerintah akan menempuh prosedur yang sangat memakan waktu. Untuk mengurangi resiko tersebut maka pemerintah menggunakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai percepatan penyelesaian masalah.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

BAB IV
ANALISIS FRAMING MAJALAH GEMA PEMBEBASAN PERSPEKTIF
ROBERT ENTMAN

Penelitian ini menganalisis pesan dakwah Hizbut Tahrir sebagaimana yang dipublikasikan Majalah online Gema Pembebasan. Dalam mengkonstruksi pesan, baik berita, opini dan artikel, Hizbut Tahrir mempunyai kecenderungan tersendiri dibandingkan dengan media lainnya. Trend atau kecenderungan pemberitaan dapat dicermati pada aspek penonjolan terhadap fakta berita, memberi frame pada isu yang berhubungan dengan visi misi dan ideologi yang diemban Hizbut Tahrir.

Dengan maksud demikian, maka peneliti menggunakan analisis framing model Robert Entman. Entman yang melihat dimensi pembingkaihan berita (news framing) dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu atas isu atau realitas.⁵⁶ Selanjutnya penelitian ini menganalisis kecenderungan isu pemberitaan yang dikonstruksi Eks Hizbut Tahrir khususnya pada Majalah Online Gema Pembebasan edisi Desember 2021 s.d Mei 2022.

A. Frame Headline Majalah Online Gema Pembebasan

Headline artinya judul berita, yang sering juga disebut sebagai kepala berita. Headline dianggap penting karena daya tarik berita dikuatkan dengan pemilihan judul berita yang baik dan tepat. Headline ini diutamakan karena

⁵⁶ Eriyanto, Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LKiS, 2005), 168.

merupakan refleksi pilihan editor dari berita penting dan berita yang sengaja ditonjolkan untuk pembaca. Berikut adalah paparan data headline pada Majalah Online Gema Pembebasan edisi Desember 2021 s.d Mei 2022

NO	Frame Headline Majalah Gema Pembebasan	EDISI
1.	Rahim KAPITALISME Melahirkan Kebebasan	Desember 2021
2.	Penghapusan Premium dan Pertalite “Menuju Liberalisasi Pada Kawasan Hilir”	Januari 2022
3.	IKN “Investor Kuasai Negara”	Februari 2022
4.	KHILAFAH Solusi Masa Depan	Maret 2022
5.	Kembali Fitri dengan REVOLUSI ISLAM	Mei 2022

Sejumlah headline pada Majalah Online Gema Pembebasan tersebut pada dasarnya merepresentasikan sudut pandang Eks Hizbut Tahrir dalam menilai suatu realitas. Sudut pandang (perspektif) Hizbut Tahrir dalam hal ini berkaitan dengan upaya transformasi nilai-nilai keislaman maupun sebagai bentuk pencerahan kepada umat melalui konstruksi pesan yang bersifat kritis. Selain itu, konstruksi pesan yang dipublikasikan Hizbut Tahrir melalui Majalah Online Gema Pembebasan dominan bersifat kritikan.

Kritikan Hizbut Tahrir tersebut ditujukan kepada pemerintah atas berbagai kebijakannya, berbagai problem sosial yang menyimpang, dan terutama kritik Hizbut Tahrir atas berbagai produk politik, ekonomi dan sosial budaya pihak liberal-kapitalis. Selanjutnya untuk memahami konteks isu yang dominan

dipublikasikan oleh Hizbut Tahrir pada Majalah Online Gema Pembebasan, maka digunakan pendekatan analisis framing model Robert Entman.

B. Skema News Framing pada Majalah Online Gema Pembebasan

Konsep mengenai framing dari Entman menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh media dengan menggunakan empat perangkat skema yakni, DP = *define problems* (pendefinisian masalah), DC = *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), MJ = *make moral judgement* (membuat pilihan moral) dan TR = *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

Berdasarkan temuan data lapangan tentang varian headline pada pada Majalah Online Gema Pembebasan, peneliti kemudian memilih 5 headline sebagai unit analisis yang mewakili publikasi pada Majalah Online Gema Pembebasan setiap bulan. Selain karena headline tersebut adalah isu sentral di masyarakat dan cenderung kontroversial, pertimbangan peneliti hanya memilih 5 unit sampel karena hal tersebut merupakan prosedur ilmiah penelitian kualitatif dalam hal menganalisis data, yakni tahap reduksi dan kategorisasi (lihat Bab Metode Penelitian) yang merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan, memfokuskan dan mengubah data kasar yang muncul dari observasi lapangan.

Berikut dipaparkan secara detil hasil reduksi dan kategorisasi data penelitian (teks berita pada Majalah Online Gema Pembebasan) yang kemudian dianalisis berdasarkan skema framing model Robert Entman.

News Framing Majalah Online Gema Pembebasan		
Sampel. 1: Rahim KAPITALISME Melahirkan Kebebasan		
Unit Frame		Deskripsi Berita
Define Problem (DP)		Identifikasi Masalah : Apparatus Kebebasan yang lahir dari rahim Kapitalisme telah memisahkan agama dengan kehidupan manusia (Sekularisme) Teks : Indoktrinasi kebebasan seolah menjadi proses urgent yang tak dapat dipersoalkan, menjadi truth inheren dalam gagasan realitas hidup manusia. Negara diberikan tuntutan dan dituntun untuk menjaga kebebasan individu. Agensi-agensi kebebasan bertugas untuk mempropagandakan kebebasan dan menyerang setiap orang lain yang berani menyoal fikiran kebebasan. Tatkala mengupas gagasan kebebasan dalam realitasnya, kita akan menemukan bahwa kebebasan merupakan gagasan yang lahir dari mabda (ideologi) Kapitalisme, ide ini tidak bersumber dari agama samawi manapun, kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (sekulerisme). Sekulerisme menjadi asas, sekaligus sebagai qiyadah fikriyah (kepemimpinan ideologis), serta kaedah berfikirnya. Berlandaskan kaedah berfikir ini, mereka berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya. mereka pertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari kebebasan berakidah, berpendapat, hak milik dan kebebasan pribadi.
Diagnose Cause (DC)		Penyebab Masalah : Kebebasan Individu yang diusung oleh Negara

	berpaham sekuler
Make Moral Judgment (MJ)	Evaluasi Moral : Kritik terhadap Kebebasan Individu paham Sekularisme Teks : Negara yang mengusung sekulerisme, manusia sendiri yang berhak menentukan kebenaran dalam realitas dunianya. Maka manusia diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupannya, selama tidak melanggar hak orang lain, negara tidak diperkenankan mengatur urusan privat - termasuk menghukum tindakan asusila selama dengan persetujuan atau tidak melanggar hak pribadi. Paradigma Sekuler ini, jelas bertentangan dengan pandangan Islam, zina maupun mendekati zina (contoh : pelecehan seksual), baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan, adalah pelanggaran hukum syara'. Tidak ada hak bagi pelaku zina dengan landasan saling setuju (consent), hukuman berlaku untuk semua pelakunya. Sedangkan bila terjadi kekerasan seksual (pemaksaan) maka hukuman hanya untuk pihak yang memaksa. Sesungguhnya kekerasan seksual hanya dapat dihapuskan, jika negeri ini menjadikan Syariat Islam sebagai hukum dalam mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan. Sebab Syariat Islam telah menciptakan konstruksi sosial yang dapat mencegah (preventif) dorongan naluri melestarikan keturunan (gharizoh nau') hadir pada situasi dan kondisi yang tidak diperbolehkan.
Treatment	Saran Penanggulangan :

Recommendation (TR)	Penegakan Syariat Islam secara menyeluruh, baik dalam urusan beragama maupun dalam kehidupan social. Teks : Islam adalah agama atau pun mabda' yang berbeda dengan yang lain. Islam bukan saja agama yang mengurus masalah ruhiyyah (spiritual), akan tetapi juga meliputi masalah politik (siyasiyyah). Atau dengan istilah lain, Islam adalah akidah spiritual dan politik (al-aqidah ar-ruhiyyah wa as-siyasiyyah). Akidah ar-ruhiyyah (akidah spiritual) adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keakhiratan, seperti surga, neraka, pahala, siksa dan dosa, termasuk masalah ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan akidah as siyasiyyah adalah akidah atau ajaran yang mengatur urusan keduniaan, seperti politik, ekonomi, social, pemerintahan, pendidikan, sanksi hukum dan sebagainya. Islam memberikan aturan solusi terhadap manusia yang dorongan naluri melestarikan keturunan (gharizoh nau') telah bangkit. Sehingga pelampiasan naluri tersebut tidak dilaksanakan secara hewani. Islam akan menghukum setiap tindakan dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan Islam seperti tindakan cabul dengan ganjaran yang besar. Pemikiran(thoughts) Islam yang menjadi problem solver baru akan teralisir dengan baik dan sempurna ketika adanya seperangkat Negara yang menerapkan pemikiran tersebut, dalam hal ini Khilafah sebuah institusi yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Stigmatisasi negative terkait Khilafah hari-hari ini,
------------------------	---

	bertujuan untuk mereduksi ajaran Islam menjadi sebatas agama ritual, paradigma tersebut harusnya otomatis tertolak bagi para pengemban dakwah yang meyakini kesempurnaan Mabda Islam.
--	---

Sampel. 2 Penghapusan Premium dan Peralite “Menuju Liberalisasi Pada Kawasan Hilir”	
Unit Frame	Deskripsi Berita
Define Problem (DP)	Identifikasi Masalah : Kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM, berimbas buruk pada masyarakat. Teks : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 yang mengatur ketentuan penyaluran dan harga BBM tahun 2022. Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tersebut merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perpres Nomor 117 Tahun 2021 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021 di tengah ramainya kabar tentang BBM jenis Premium dan Peralite dihapus. Terdapat sejumlah ketentuan yang berubah terkait penyaluran dan ketentuan harga bensin, khususnya BBM jenis Premium dan Peralite. Kebijakan tersebut diterbitkan dengan pertimbangan untuk mendukung komitmen nasional dalam penurunan emisi karbon melalui upaya menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor serta mengoptimalkan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh wilayah Indonesia.

		Dalam aturan terbaru, Jokowi menugaskan Menteri ESDM untuk menyusun dan menetapkan peta jalan BBM bersih dan ramah lingkungan. Ini berkaitan dengan penghapusan Premium dan Peralite yang dinilai kurang ramah lingkungan. Peta jalan BBM bersih dan ramah lingkungan yang disusun Menteri ESDM harus berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagaimana tertuang dalam Pasal 21C aturan ini. (JAKARTA, KOMPAS.com)
Diagnose (DC)	Cause	Penyebab Masalah : Lemahnya pengelolaan Ekonomi oleh pemerintah dan hanya berfokus pada keuntungan segelintir Oligarki
Make Judgment (MJ)	Moral	Evaluasi Moral : Kritik terhadap Kenaikan harga Peralite dan Premium Teks : Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, dampak penghapusan Premium lebih kecil jika dibanding produk gasoline lain karena konsumsinya juga minim. “Konsumsi premium saat ini hanya 7,8% jika dibandingkan dengan konsumsi total BBM, dan 11,7% jika dibandingkan dengan konsumsi gasoline seperti Peralite, Pertamina dan Pertamina Turbo,” jelas Mamit kepada MNC Portal Indonesia, Senin (27/12/2021). Lanjutnya, angka konsumsi yang relatif rendah ini disebabkan kesadaran dari masyarakat yang sudah mulai menggunakan BBM dengan RON tinggi seperti Peralite bahkan Pertamina. Di sisi lain, produk Premium juga sudah mulai langka di pasaran seperti dikemukakan sendiri

	oleh masyarakat. “Sekarang saya pakai Pertalite. Premiumnya udah nggak ada sama sekali, udah jarang (ada di SPBU),” ujar salah seorang supir taksi, Yahya, saat ditemui MNC Portal Indonesia di SPBU Pertamina Jl. Mayjen Sutoyo, Minggu (26/12) lalu. Bila kita lihat dari kacamata Rakyat penggunaan BBM Premium dan pertalite, tentu akan memberikan sebuah pandangan yang berbeda. Hari ini pada umumnya rakyat sadar terkait pentingnya BBM yang ramah lingkungan dan mereka tentu menyukai hal – hal positif bukan sebaliknya. Akan tetapi pemerintah harus melihat disisi lain, salah satunya adalah harga BBM itu sendiri. Jika sekiranya BBM yang ramah lingkungan harganya terjangkau oleh rakyat saya rasa mereka tentu akan memilih BBM yang ramah lingkungan tadi, tapi jika pada dasarnya harga BBM yang ramah lingkungan ini mahal dan sulit untuk terjangkau oleh rakyat maka ini salah satu penyebab rakyat tidak mengutamakan BBM ramah lingkungan tersebut. Penyebab utamanya adalah lemahnya perekonomian rakyat hari ini, apa lagi setelah dihantam pandemik covid 19 yang belum juga tuntas, maka dari itu BBM yang lebih murah menjadi incaran rakyat menengah ke bawah, BBM yang terjangkau seperti premium dan pertalite akan dihapus diganti menjadi pertamax yang tentu harganya lebih mahal dari premium dan pertalite. Kalau ini diteruskan tentu bentuk kezaliman terhadap rakyat karena memaksa membeli BBM yang harganya lebih mahal dari pada BBM premium dan pertalite. Seharusnya pemerintah itu memberikan solusi
--	--

	yang tidak membuat rakyat kesulitan, jangan karena memikirkan ramah lingkungannya lalu dihapus BBM yang dapat dijangkau rakyat setelah menyediakan BBM partamax yang harganya lebih mahal.
Treatment Recommendation (TR)	Saran Penanggulangan : Negara harus berfokus pada kesejahteraan rakyatnya, dengan pengelolaan ekonomi yang berbasis kerakyatan Teks : Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam seharusnya rakyat pun hidup dalam kemakmuran jika pengelolaan sumber daya alam ini dikelola oleh negara, tapi realita hari ini terbalik semua sumberdaya alam kita diserahkan keswasta hingga pada akhirnya hanya segelintir saja yang menikmati kekayaan alam ini. Alhasil, beberapa fakta diatas menunjukkan bahwa alih-alih mengantarkan negara ini menjadi negara yang maju, mandiri,dan mampu menyejahterakan rakyatnya, pengelolaan ekonomi negara semakin acak-acakan tidak jelas bagaimana jalan keluar dari problem rakyat hari ini. coraknya semakin kapitalistik dan mendukung kepentingan oligarki dan semakin jauh dari ideologi islam. Sehingga keberkahan dalam kehidupan rakyat ini tidak ada.

Sampel 3 : IKN “Investor Kuasai Negara”	
Unit Frame	Deskripsi Berita
Define Problem (DP)	Identifikasi Masalah : Pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan justru akan menambah penderitaan masyarakat

		Teks : Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan adalah bagian alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Tetapi, apakah itu akan terwujud? Apalagi pemerataan kesejahteraan rakyat? Disampaikan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) telah menyelesaikan riset simulasi pemindahan ibu kota menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium). Dari riset ini, Indef menyimpulkan pemindahan ibu kota tidak bakal menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan antar wilayah. Peneliti Indef, Rizal Taufikurrahman dalam diskusi online Media Umat bertajuk, “IKN Untuk Siapa?” mengatakan “Pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perateumbuhan PDB riil”. Berdasarkan temuannya, pemerataan tidak akan tercapai segampang itu. Apalagi, ini bukan memindahkan pabrik, tapi lebih banyak memindahkan aktivitas pemerintahan.
Diagnose Cause (DC)		Penyebab Masalah : Kebijakan Pemerintah
Make Moral Judgment (MJ)		Evaluasi Moral : Kritik terhadap keputusan sepihak pemerintah Teks : Bappenas menyatakan kontribusi APBN untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang baru sebesar 19,2%. Namun dalam perkembangannya, rezim penguasa mewacanakan porsi dari APBN naik menjadi 53,3% dan sisanya 46,5% menggunakan

	dana lain dari skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU, Swasta dan BUMN. Artinya, pemerintah harus menggelontorkan dana lebih dari 200 triliun rupiah dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 466 triliun. Namun informasi tersebut sudah dihapus dari laman ikn.go.id pada Selasa (18/1). Hal ini menunjukkan perencanaan yang labil. Untuk proyek yang sangat strategis, ini tentu kebijakan yang main-main. Terlepas besar kecilnya APBN, hal ini akan membebani rakyat. Karena salah satu sumber APBN negeri ini adalah Pajak. Pajak khusus IKN juga mulai diwacanakan. Skenario yang sangat mungkin terjadi yaitu kenaikan harga, baik itu pada kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, listrik atau yang lainnya dengan menambah tarif pajak. Jika APBN telah membengkak, maka rakyat akan kembali dipalak. Semua cara dihalalkan termasuk dengan meningkatkan tarif pajak.
Treatment Recommendation (TR)	Saran Penanggulangan : Penerapan Syariat Islam demi meratanya kesejahteraan masyarakat. Teks : Apakah ini yang dikatakan dengan rencana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan? Apalagi pemerataan kesejahteraan rakyat? Mari kita renungkan kembali dan berpikir berulang kali jika mendukung proyek pemindahan ibu kota ini. Masihkah kita ngotot untuk mendukung proyek ini, padahal jelas rakyat masih banyak yang belum sejahtera. Selalu terucap janji manis oleh para

	pemimpin negeri ini, tapi sering kali kembali dikibuli. Bukan tak percaya, tetapi sistem yang berjalan di negeri ini menghendaki untuk selalu berpihak pada oligarki. Maka hanya kepada penerapan Islamlah kita bisa berharap agar kesejahteraan rakyat bisa merata.
--	---

Sampel. 4 : Khilafah Solusi Masa Depan		
Unit Frame	Deskripsi Berita	
Define Problem (DP)	Identifikasi Masalah : Ketiadaan sistem Khilafah Islamiyah yang dijadikan dasar bernegara Teks : “...penghapusan Khilafah Utsmaniyah pada tanggal 28 Rajab 1342 H (3 Maret 1924 M) oleh Mustafa Kemal Atatürk. Seorang dari etnis Yahudi antek Inggris. Penghapusan Khilafah Utsmaniyah menandai sekularisasi di dunia Islam. Penghapusan Khilafah juga menandai dimulainya penderitaan kaum Muslim di seluruh dunia hingga hari ini. Tepat satu abad atau 101 tahun. Khilafah adalah satu-satunya sistem pemerintahan di dalam Islam. Istilah Khalifah, jamaknya Khulafa”, bukanlah istilah yang asing di kalangan kaum Muslim sepanjang zaman; kecuali orang yang jahil tentang Islam. Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, “Khilafah, Imamah Kubra dan Imarah al-Mu”minin merupakan istilah-istilah yang sinonim dengan makna yang sama.” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, 9/881). Imam al-Mawardi [w. 450 H] menyatakan, “Imamah (Khilafah) dibuat untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengurus dunia.” (Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hlm. 3).	
Diagnose Cause (DC)	Penyebab Masalah : Sekularisasi di dunia Islam	

Make Moral Judgment (MJ)	Evaluasi Moral : Kritik terhadap sistem demokrasi dan sekularisme Teks : Tanpa Khilafah, syariah Islam tak bisa diterapkan secara kaffah. Tanpa Khilafah, bahkan penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad fi sabilillah terhenti. Selain itu, tanpa Khilafah, banyak kerugian yang menimpa umat Islam dan dunia secara umum. Di antaranya: 1. Dunia Islam terpecah-belah dan tertindas. Pasca Khilafah Utsmaniyah dihapuskan, umat Islam hidup terpecah-belah atas dasar nasionalisme di lebih dari 50 negara. Akibatnya, kaum Muslim menjadi lemah. Padahal jumlah mereka banyak. Lebih dari 1,5 miliar. Namun, mereka menjadi santapan empuk negara-negara imperialis Barat. Demikianlah yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina, Kashmir, Afghanistan, Irak, Muslim Rohingya, Uighur, dll. 2. Kekayaan alam negeri-negeri Muslim dirampok. Negeri-negeri Muslim adalah negeri yang kaya akan sumberdaya alam (SDA). Namun sayang, kekayaan alam tersebut tidak dinikmati oleh umat Islam. Kekayaan alam tersebut diambil-alih oleh negara atau oleh perusahaan-perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Negara-negara kafir Barat pun, melalui perusahaan-perusahaannya, menjarah kekayaan alam di negeri-negeri Muslim atas nama investasi. Padahal kaum Muslim adalah pemilik seluruh sumber daya alam tersebut. 3. Umat Islam kehilangan kewibawaan. Allah SWT menyebut umat Islam dengan sebutan Khairu Umah (umat terbaik) (Lihat: QS Ali Imran [3]: 110). Namun faktanya, tanpa Khilafah, saat ini umat Islam bukanlah terbaik. Bahkan menjadi umat yang terbelakang. Tanpa Khilafah, umat Islam pun kehilangan wibawa. Dihinakan oleh kafir Barat.
---------------------------------	---

	5. Tempat suci umat Islam ternoda. Tanpa Khilafah, banyak tempat-tempat suci kaum Muslim ternoda. Salah satunya al-Quds. Kiblat pertama umat Islam. Al-Quds telah lama dinodai oleh Zionis Israel hingga hari ini. 6. Umat Islam terasing dari Islam, bahkan memusuhi Islam. Tanpa Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah, yang kemudian digantikan dengan kehidupan yang diatur dengan nilai-nilai Barat sekuler, umat Islam semakin terasing dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka menganggap syariah Islam sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tuntunan zaman. Mereka sampai pada tahap memusuhi ajaran agamanya sendiri, seperti Khilafah. Inilah akibat dari proses sekularisasi yang telah sekian lama merasuki pikiran umat Islam. 7. Al-Quran dan Rasulullah saw. Dihinakan. Kita juga tidak lupa dengan penghinaan dan pelecehan yang dilakukan kafir Barat terhadap al- Quran dan Rasulullah saw. Ini sudah sering terjadi dan terus berulang
Treatment Recommendation (TR)	Saran Penanggulangan : Penegakan sistem Khilafah Islamiyah sebagai kewajiban Teks : Saatnya kaum Muslim di seluruh dunia bergerak untuk mengembalikan Khilafah „ala minhaj an-Nubuwwah. Apalagi menegakkan Khilafah adalah kewajiban syariah. Bahkan kewajiban syariah terbesar. Kewajiban ini telah menjadi Ijmak Sahabat. Imam al-Haitami menegaskan Sungguh para Sahabat—semoga Allah meridhai mereka—telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan upaya mengangkat imam/ khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda

	(sementara) kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah saw. (Al-Haitami, Ash-Shawâ'iq al-Muhriqah, hlm. 7). Kedudukan Ijmak Sahabat sebagai dalil syariah—setelah al-Quran dan as-Sunnah—sangatlah kuat. Imam as-Sarkhashi [w. 483 H] menegaskan: Siapa saja yang mengingkari kedudukan Ijmak sebagai hujjah yang secara pasti menghasilkan ilmu berarti benar-benar telah membatalkan fondasi agama ini. Karena itu orang yang mengingkari Ijmak sama saja dengan berupaya menghancurkan fondasi agama ini (Ash-Sarkhashi, Ushûl as-Sarkhashi, I/296). Bahkan Khilafah telah menjadi Ijmak Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali). Syaikh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menuturkan: Para imam mazhab (yang empat) telah bersepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah wajib... (Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala al-Madzâhib al-Arba‘ah, V/416). Hal senada ditegaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, “Para ulama telah sepakat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal.” (Ibn Hajar, Fath al-Bâri, 12/205). Karena itu kita tentu sangat berharap Khilafah „ala minhaj an-Nubuwwah ini segera bisa ditegakkan kembali oleh kaum Muslim.
--	--

Sampel. 5 : Kembali Fitri dengan Revolusi Islam	
Unit Frame	Deskripsi Berita
Define Problem (DP)	Identifikasi Masalah : Idul Fitri dengan penuh ketidakpastian akan kehidupan Teks : Idul Fitri selalu dirayakan sebagai momen kebahagiaan sebab ini merupakan hari raya muslim. Rasa-rasanya 1 hari itu seluruh beban hidup (inflasi, kerjaan,

		kenakalan remaja, dll) telah terangkat. Sayangnya beban-beban itu hanya terangkat setiap tanggal 1 – 4 Syawal (hari raya Idul Fitri dan hari Tasyrik). Selepas cuti bersama lebaran semua beban tadi kembalikan dalam kehidupan. Ayah mulai menanggung kembali tugas-tugas kerjaan, ibu mulai muter otak ngakalin harga komoditas, dan keduanya mulai mencemaskan anak-anaknya terseret lingkungan negatif. Kehadiran beban-beban ini menyelimuti sebagian besar yang berakal. Dampaknya, banyak yang berakal sehat mencari pelarian. Pelariannya dengan menghibur diri (rumpi/melancong/dlsb). Selepas 'lari dari beban hidup', beban hidup kembali menghantui.
Diagnose (DC)	Cause	Penyebab Masalah : Kebijakan pemerintah
Make Judgment (MJ)	Moral	Evaluasi Moral : Kritik terhadap kebijakan pemerintah Teks : Seandainya kita bersedia menyediakan waktu berpikir serius atas beban hidup ini, kita akan sampai pada akarnya: sistem Negara yang kapitalis. Dalam negara yang kapitalis cara negara mengentaskan kelangkaan adalah produksi. Solusi ini membutuhkan negara dalam pengentasan kesenjangan sebab negara hanya mendorong produksi. Preseden buruk ini menyebabkan kelaparan di Afrika dan negara berkembang. Di Afrika yang sejatinya produsen $\frac{1}{4}$ makanan dunia malah kelaparan. Padahal di sisi lain Eropa dan Amerika Utara yang memproduksi lebih sedikit makanan justru bergelimpangan makanan.

Treatment Recommendation (TR)	Saran Penanggulangan : Penegakan Sistem Khilafah. Teks : Solusi sesat pengentasan kelangkaan via produksi tidak akan terjadi dalam negara ber-syariat Islam, sebab Islam memaksa negara berfokus pada distribusi. Permasalahan kemiskinan akarnya pada distribusi yang tidak tepat. Kelaparan Afrika memberikan contoh produksi akan percuma seandainya distribusi berputar pada segelintir manusia. Solusi-solusi Islam ini tidak akan terwujud di negara demokrasi. Apa sebab? Sebab demokrasi adalah inang alami Kapitalisme. Demokrasi akan selalu mematikan langkah penerapan Syariat Islam. Oleh karena itu harus Indonesia harus berpindah haluan menerapkan syariat Islam. Namun, negara yang menerapkan syariat Islam hanya berada dalam bentuk Khilafah Islam.
-------------------------------	--

Hasil analisis framing di atas menunjukkan kecenderungan Hizbut Tahrir dalam menyampaikan pesannya melalui majalah Online Gema Pembebasan. Kecenderungan atau aspek yang ditonjolkan Hizbut Tahrir yang dimaksud adalah pada empat skema framing, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), make moral judgement (membuat pilihan moral) dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian).

Dalam konteks define problems (pendefinisian masalah), Hizbut Tahrir dalam majalah online tersebut cenderung menyoroiti masalah kegagalan sistem

pemerintahan demokrasi, infiltrasi negara Barat melalui penegakan HAM, transformasi paham liberalisme, sekularisme, kapitalisme disegala sisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada konteks *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), Hizbut Tahrir cenderung mengklaim bahwa penyebab masalah adalah negara dalam hal ini pemerintah dan pihak asing dan berbagai bentukan organisasi yang dianggap menyimpang dari kontek pemikiran Hizbut Tahrir (ideologi khilafah), seperti PBB, *World Trade Organization* (WTO) dan sebagainya. Selain itu Hizbut Tahrir menganggap karena kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang ajaran Islam menjadi penyebab masalah.

Aspek *make moral judgement* (membuat pilihan moral) dalam hal ini Hizbut Tahrir dominan mengajukan kritik terhadap sistem sekular, demokrasi, paham kebebasan dan HAM, neoimperialisme AS dan sebagainya dimana kritikan tersebut berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi Hizbut Tahrir atas realitas sosial kemudian memberikan alternatif solusi kepada umat (*moral judgement*). Dalam konteks ini terlihat karakteristik utama Hizbut Tahrir dalam konstruksi pesan dakwahnya melalui multimedia, yaitu menyampaikan teks keagamaan (ayat suci Al-Qur'an dan Hadist) sebagai suatu pencerahan (*media literasi*) atas problem keumatan dan kebangsaan.

Treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan Hizbut Tahrir sesungguhnya mengerucut pada konteks penegakan syariat atau sistem khilafah sebagai substitusi sistem demokrasi. Dalam konteks ini pula Hizbut Tahrir memiliki harapan akan adanya

peran pemerintah dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pemikiran dan gerakan dakwah Hizbut Tahrir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis framing di atas menunjukkan kecenderungan Hizbut Tahrir dalam menyampaikan pesannya melalui majalah Online Gema Pembebasan. Kecenderungan atau aspek yang ditonjolkan Hizbut Tahrir yang dimaksud adalah pada empat skema framing. Dalam konteks define problems (pendefinisian masalah), Hizbut Tahrir dalam majalah online tersebut cenderung menyoroti masalah kegagalan sistem pemerintahan demokrasi. Pada konteks diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), Hizbut Tahrir cenderung mengklaim bahwa penyebab masalah adalah negara dalam hal ini pemerintah dan pihak asing dan berbagai bentukan organisasi yang dianggap menyimpang dari kontek pemikiran Hizbut Tahrir (ideologi khilafah), seperti PBB, World Trade Organization (WTO) dan sebagainya.

Aspek make moral judgement (membuat pilihan moral) dalam hal ini Hizbut Tahrir dominan mengajukan kritik terhadap sistem sekular, demokrasi, paham kebebasan dan HAM, neoimperialisme AS dan sebagainya dimana kritikan tersebut berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi Hizbut Tahrir atas realitas sosial kemudian memberikan alternatif solusi kepada umat (moral judgement). Treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan Hizbut Tahrir sesungguhnya mengerucut pada

konteks penegakan syariat atau sistem khilafah sebagai substitusi sistem demokrasi.

B. Saran

Penelitian tentang gerakan yang dilakukan oleh eks-HTI melalui tulisan, baik melalui media cetak maupun majalah online, memiliki pola khusus yang diulang secara terus-menerus dalam sebuah tulisan. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sebuah pisau analisis. Di samping itu, penulis juga berharap penelitia yang tentang corak gerakan eks-HTI ini tidak terbatas pada aspek apa yang mereka tulis, namun juga berkembang pada aspek perilaku yang jauh lebih berdampak dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat sebagai sebuah indoktrinasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Nurhadi, Zikri fachrul. 2015. Teori-Teori komunikasi: teori komunikasi dalam perspektif penelitian kualitatif. Bogor: ghalia indonesia.
- Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir Dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Yunanto, Sri. 2017. *Negara khilafah versus negara kesatuan republik indonesia*. Jakarta: ipps.
- Hasan, noorhaidi. *islam politik di dunia kontemporer konsep, ideologi, teori* (Yogyakarta: suka press, 2012).
- Eriyanto. 2002. Analisis framing. Yogyakarta: lkis.
- Sobur, Alex. 2009. Analisis teks media: suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing. Bandung: remaja rosdakarya.
- Kariyantono, Rachmat. 2006. Teknik praktis riset komunikasi. Jakarta: pt fajar interpratama mandiri
- Sa'fan, kamil. 2019. *kontroversi khilafah dan negara islam; tinjauan kritis atas pemikiran politik ali abdur raziq*. Mesir: erlangga.
- Faiz, Fahrudin. 2003. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam.
- Susanto, Edi. 2016. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Arif, Syaiful. 2016. *Pandangan Dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (Hti) Dalam Sistem Kenegaraan Di Indonesia*. Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 1, Juni.

- Nawab Mohamed Osman Source, Mohamed. 2019. *"The Transnational Network Of Hizbut Tahrir Indonesia,"* South East Asia Research Vol. 18, No. No. 4.
- Prasetyo, Bambang. 2019. *pembubaran hizbut tahrir di indonesia dalam perspektif sosial politik.* Analisis: jurnal studi keislaman, vol. 19, no. 2.
- Zulfadli. 2018. *orientasi politik aktivis eks hizbut tahrir indonesia pasca dibubarkan.* Kontekstualita: jurnal penelitian sosial keagamaan, vol. 33 no. 2.
- Qohar, Abdul. 2017. *"Eksistensi gerakan ideologi transnasional hti sebelum dan sesudah pembubaran cepet tumbuh berkembang dan sangat jelas menunjukan watak secara kuantitas . Gerakan yang didirikan oleh taqiyuddin an-,"* kalam vol. 11, no. 2.
- Sabari. 2017. *Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia, Ilmu Dakwah.* Academic Journal For Homiletic Studies. Vol. 11, No. 1.
- Akbar, Idil. 2017. *"Khilafah Islamiyah; Antara Konsep Dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran Dan Kerajaan Islam Arab Saudi)".* Journal Of Government And Civil Society, Vol. 1.
- Muqtada, Muhammad rikza. 2018. *"Hadis khilafah dan relasinya terhadap kontestasi politik hizbut tahrir indonesia (Hti) pasca-Perpu nomor 2 tahun 2017",* mutawatir: jurnal keilmuan tafsir hadis, vol. 8, no. 1.
- Amin, Ainur rofiq. 2012. *Membongkar khilafah ala hizbut tahrir di indonesia.* Yogyakarta: Ikis.

Supriadi, Cecep. 2015. *“Relasi islam dan negara; wacana keislaman dan keindonesiaan”*, jurnal kalimah, vol. 13, no. 1.

Tanjung, indra utama. 2018. *“Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia”*, jurnal penelitian medan agama, vol. 9, no. 1.

Rafiuddin, Mohammad rafiuddin. 2015. *“Mengenal hizbut tahrir (Studi analisis ideologi hizbut tahrir vis a vis nu)”*. jurnal islamuna, vol. 2, no. 1.

Amin, Ainur rofiq. 2017. *“Kritik pemikiran khalifah hizbut tahrir yang autokratik”*, teosofi: jurnal tasawuf dan pemikiran islam, vol. 7, no. 2

Hayati, Nilda. 2017. *“Konsep Khilafah Islamiyyah Hizbut Tahrir Indonesia; Kajian Living Al-Qur'an Perspektif Komunikasi”*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No.1.

Skripsi

Rentika Waty, Reni. *“Skripsi”*, *Gerakan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan: Studi atas Konsolidasi Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Perppu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Hakim, Azrul. 2011. *“Konsep pemerintahan dalam islam (Studi terhadap pemerintahan khilafah menurut ali abdur raziq)”*. Skripsi: uin sultan syarif kasim riau.

Majalah

Media Pembebasan, *Kembali Fitri dengan Revolusi Islam*, edisi Mei 2022.

<https://karyakarsa.com/mediapembebasan/posts>